

**KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK
DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN
DALAM PERSPEKTIF PANCASILA**

1. Identitas :

- a. **Nama Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila**
 b. **Semester : 5 (lima)**
 c. **Kompetensi Dasar**

KI 1	1.1 Menghargai perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghormati hak asasi manusia.
KI 2	2.1 Bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
KI 3	3.1 Menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
KI 4	4.1 Menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- d. **Materi Pokok : Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban dalam Perspektif Pancasila**
 e. **Alokasi Waktu : 2 JP X 8 (@ 45')**
 f. **Tujuan Pembelajaran :**

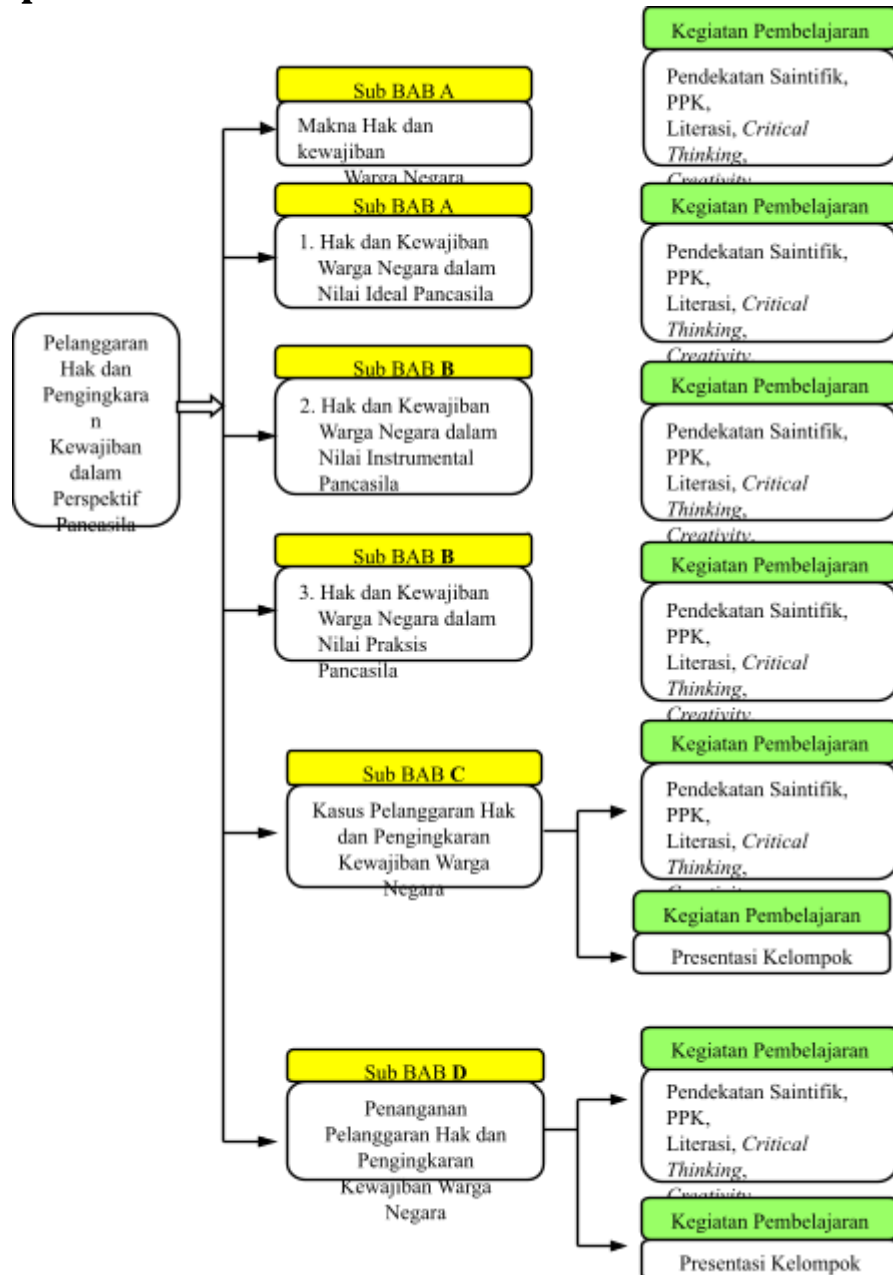
Melalui kegiatan pembelajaran dengan metode **diskusi, tanya jawab, analisis, penugasan, dan presentasi** dengan pendekatan saintifik, peserta didik dapat menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan terampil mengungkapkan pernyataan umum dan tahapan-tahapan secara lisan, terampil menuliskan pernyataan umum dan tahapan-tahapan sehingga peserta didik dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya melalui belajar PPKn, mengembangkan **sikap/karakter jujur, peduli, dan bertanggung jawab** serta dapat mengembangkan kemampuan **berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi (4C) dan berliterasi**.

- g. **Materi Pembelajaran**

- ❑ Bacalah Buku Teks Pelajaran (BTP) : **PPKn SMA/ MA Kelas XII. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, edisi revisi 2018 hal. 1 s.d. 26.**
 ❑ Carilah diberbagai media permasalahan terkait tentang ;

- 1) Makna hak dan kewajiban warga negara.
- 2) Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila.
- 3) Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
- 4) Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga.

2. Peta Konsep



3. Proses Belajar

Pendahuluan

Sebelum mempelajari materi ini, silakan Anda membaca dan memahami teks di bawah ini.

Dalam melakukan suatu kegiatan, pemahaman tahap-tahap dalam mengerjakannya sangat penting. Pelaksanaan setiap tahap tersebut menggambarkan proses berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan seseorang. Apabila seseorang memahami cara melakukan suatu kegiatan, maka keberhasilan kegiatan tersebut sudah tergambar. Namun sebaliknya, apabila melakukan suatu kegiatan tetapi tidak memahami caranya atau prosedurnya, maka kemungkinan kegagalan akan lebih besar. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang konsep tersebut?

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, silakan Anda lanjutkan ke kegiatan berikut dan ikuti petunjuk yang ada dalam UKBM ini

Kegiatan Inti

1. Petunjuk Umum UKBM

- Baca dan pahami materi pada Buku Siswa PPKn XII yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, halaman 1 s.d. 26.
- Setelah memahami isi materi dalam bacaan berlatihlah untuk berpikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangku atau teman lainnya.
- Kerjakan UKBM ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang telah disediakan.
- Anda dapat belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan **ayo berlatih**, apabila Anda yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan belajar 1 sd 8. Anda boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk mengikuti tes formatif agar Anda dapat belajar ke UKBM berikutnya.

2. Kegiatan Belajar

Pada bab ini, Anda akan diajak untuk menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di akhir pembelajaran pada bab ini, diharapkan Anda menjadi warga negara yang selalu menyeimbangkan hak dan kewajiban.

Ayo... ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan konsentrasi!!!



Kegiatan Belajar

1

PPKn - 1.1 2.1 3.1 4.1 /5/1-1

Petunjuk Umum UKBM

- Baca dan fahami materi pada *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan XII*. Edisi revisi 2018 Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Hal 1-4. Manfaatkan Perpustakaan, Lingkungan sekitar, jika memungkinkan browsing di internet atau pelajari materi di bawah ini!
- Setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah untuk berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini. Baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangku atau teman lainnya!
- Kerjakan UKBM ini dibuku kerja!

Sebagai tahap awal pembelajaran pada bab ini, cermatilah berita di bawah ini.

Mendagri: Partisipasi Pilpres 70 Persen Sudah Luar Biasa

Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Bersatu II, Gamawan Fauzi mengapresiasi tingginya partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli lalu. Dia menilai, partisipasi pemilih Pilpres mencapai 70 persen adalah luar biasa. "Ini (partisipasi pemilih) 70 persen itu luar biasa. Sudah bagus," kata Gamawan di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).

Ia mengatakan, wajar jika persentase angka partisipasi pemilu legislatif (Pileg) lebih tinggi dibandingkan Pilpres. Sebab, kata Gamawan, pada Pileg, kandidat dipilih lebih banyak. "Kalau Pileg kerabat ikut memilih. Kandidatnya lebih banyak, 12.000 orang. Kalau Pilpres ini hanya empat orang kandidat," ujar mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui persentase tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 menurun dibandingkan Pileg April 2014 dan Pilpres 2009. Partisipasi pemilih Pilpres 2014 hanya 70 persen. "Partisipasi (Pilpres 2014) sekitar 70 persen. Memang kalau dilihat tren nasional mengalami penurunan," kata Sigit.

Partisipasi pemilih pada Pileg 2014 mencapai 75,14 persen. Sedangkan pada Pilpres 2009 partisipasi pemilih adalah 72 persen. Namun, dia mengatakan, angka 70 persen bukan angka yang buruk. Pada Pileg tercatat ada 124.972.491 suara sah. Adapun daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu Legislatif 2014 mencatatkan 185.826.024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 mencapai 75,11 persen. Dengan angka partisipasi itu, 24,89 persen pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun total pemilih yang tercatat dalam DPT pilpres sebanyak 190.307.134 orang. Jumlah ini meningkat 2.454.142 orang dari DPT Pileg. Penurunan tingkat partisipasi di Pilpres terjadi secara persentase, meski terjadi peningkatan dari sisi jumlah suara.

Sumber: <http://www.kemendagri.go.id/news/2014/07/24/>

Nah, setelah Anda mencermati berita tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini.

1. Mengapa partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan angka partisipasi pada saat Pemilu Legislatif (Pileg) 2014?
2. Berdasarkan berita tersebut, jumlah pemilih yang tidak memberikan hak pilihnya (golongan putih/Golput) pada Pilpres 2014 sebesar 30 %. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan Pilpres 2014 (27,7%) dan Pilpres 2004 (24%). Berkaitan dengan hal tersebut, coba Anda identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka Golput tersebut!
3. Apakah Golput dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?
4. Menurut Anda, apa dampak terburuk ketika tingkat partisipasi rakyat pada pemilihan umum terus mengalami penurunan?
5. Coba Anda rumuskan solusi untuk mencegah terus menurunnya tingkat partisipasi rakyat pada kegiatan pemilihan umum!

Ayo Berlatih !

1. Bacalah buku atau sumber lain yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran pada bab ini. Kemudian coba identifikasi tiga pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para pakar/ahli. Tuliskan hasil identifikasi Anda dalam tabel di bawah ini.

No.	Nama Ahli	Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara
1		
2		
3		

2. Berdasarkan pendapat-pendapat para pakar yang Anda temukan, coba Anda analisis persamaan dan perbedaannya.
3. Coba Anda rumuskan makna hak dan kewajiban warga negara berdasarkan pendapat sendiri.

Kegiatan Belajar

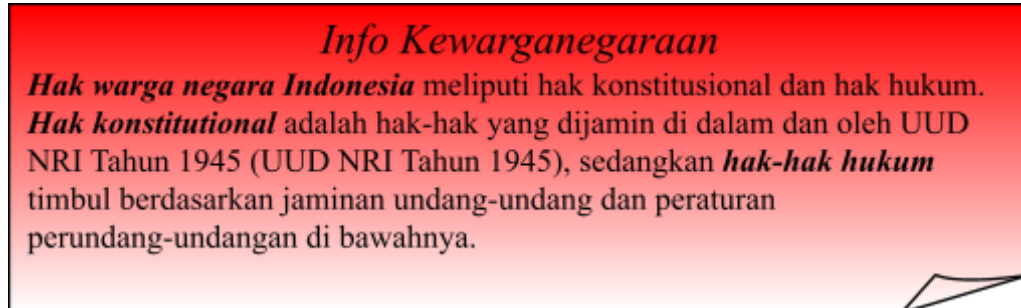
2

PPKn - 1.1 2.1 3.1 4.1 /5/1-2

Petunjuk Umum UKBM

- a. Baca dan fahami materi pada *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan XII*. Edisi revisi 2018 Jakarta: Kementerian Pendidikan dan

- Kebudayaan, Hal 5-8. Manfaatkan Perpustakaan, Lingkungan sekitar, jika memungkinkan browsing di internet atau pelajari materi di bawah ini!
- Setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah untuk berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini. Baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangku atau teman lainnya!
 - Kerjakan UKBM ini dibuku kerja!



A. Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila

Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negara?

Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Ketiga nilai tersebut secara langsung ataupun tidak langsung mengatur hak dan kewajiban warga negara

1. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Dasar Sila-Sila Pancasila

- Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin* hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk :
 - membina kerja sama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
 - mengembangkan toleransi antarumat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang; serta
 - tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.
- Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan* hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban warga negara yang tersirat dalam sila kedua ini di antaranya kewajiban untuk:
 - memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa;
 - mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya;
 - mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain; serta
 - melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan.
- Sila Persatuan Indonesia menjamin* hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak

mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk:

- menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara;
- mencintai tanah air dan bangsa Indonesia;
- mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika; serta
- memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

4. *Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan* dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk:

- mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- tidak memaksakan kehendak kepada orang lain; dan
- memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya.

5. *Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia* mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk:

- mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar;
- tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; dan
- suka bekerja keras.

Ayo Berlatih !

Identifikasi jenis hak dan kewajiban warga negara yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Tuliskan hasil identifi kasimu dalam tabel di bawah ini dan presentasikan di depan kelas!

No.	Sila Pancasila	Hak Warga Negara	Kewajiban Warga Negara
1	Ketuhanan Yang Maha Esa		
2	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab		
3	Persatuan Indonesia		
4	Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan		
5	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia		

Kegiatan Belajar

3

PPKn - 1.2 2.2 3.2 4.2 /5/1-3

Petunjuk Umum UKBM

- a. Baca dan fahami materi pada *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan XII*. Edisi revisi 2018 Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal 8-13. Manfaatkan Perpustakaan, Lingkungan sekitar, jika memungkinkan browsing di internet atau pelajari materi di bawah ini!
- b. Setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah untuk berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini. Baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangkai atau teman lainnya!
- c. Kerjakan UKBM ini dibuku kerja!

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila

Nilai instrumental pada dasarnya merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan daerah. Pada *kegiatan belajar 3* ini, melalui berbagai sumber lakukanlah analisis mengenai keberadaan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945.

Apabila Anda telaah UUD NRI Tahun 1945, baik naskah sebelum ataupun setelah perubahan, Anda akan mudah menemukan ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada dirinya. Ketentuan tersebut dapat Anda identifikasi mulai dari Pasal 26 sampai Pasal 34. Dalam ketentuan tersebut, diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia.

Ayo Berlatih !

Nah, setelah membaca uraian materi di atas, dan menggali informasi dari berbagai sumber, lakukanlah identifikasi mengenai perwujudan hak dan kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945. Tuliskan hasil identifikasimu dalam tabel di bawah ini. Infomasikan temuanmu kepada teman-teman yang lain.

Perwujudan Hak Warga Negara		
No.	Jenis Hak Warga Negara	Contoh Perwujudannya
1		
2		

3		
4		
5		
Perwujudan Kewajiban Warga Negara		
No.	Jenis Hak Warga Negara	Contoh Perwujudannya
1		
2		
3		
4		
5		

Kegiatan Belajar

PPKn - 1.2 2.2 3.2 4.2 /5/1-4

1. Petunjuk Umum UKBM

- Baca dan fahami materi pada *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan XII*. Edisi revisi 2018 Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal 14-16. Manfaatkan Perpustakaan, Lingkungan sekitar, jika memungkinkan browsing di internet atau pelajari materi di bawah ini!
- Setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah untuk berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini. Baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangkai atau teman lainnya!
- Kerjakan UKBM ini dibuku kerja!

3. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

Nilai praksis pada hakikatnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Dengan kata lain, nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka.

Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari.

Ayo Berlatih !

Nah, setelah membaca uraian materi di atas, serta menggali dari berbagai sumber, lakukanlah identifikasi perwujudan dari nilai-nilai instrumental. Tuliskan hasil identifikasimu dalam tabel di bawah ini. Infomasikan temuanmu kepada teman-teman yang lain.

No.	Nilai Instrumental	Perwujudan Dalam Kehidupan Sehari-hari
1		
2		
3		
4		
5		

Kegiatan Belajar**5****PPKn - 1.3 2.3 3.3 4.3 /5/1-5****Petunjuk Umum UKBM**

- Baca dan fahami materi pada *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan XII*. Edisi revisi 2018 Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal 17-21. Manfaatkan Perpustakaan, Lingkungan sekitar, jika memungkinkan browsing di internet atau pelajari materi di bawah ini!
- Setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah untuk berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini. Baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangkau atau teman lainnya!
- Kerjakan UKBM ini dibuku kerja!

Definisi

Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atau, bias juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan

B. Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

1. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga Negara

Pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara di antaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

1. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri
2. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Sikap tidak toleran.
4. Penyalahgunaan kekuasaan.
5. Ketidaktegasan aparat penegak hukum.
6. Penyalahgunaan teknologi.

2. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi misalnya sebagai berikut.

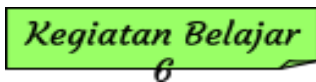
- a. Proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan, misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” belum sepenuhnya dilaksanakan.
- b. Saat ini, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi, padahal Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- c. Makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal, Pasal 28A–28J UUD NRI Tahun 1945 menjamin keberadaan Hak Asasi Manusia.
- d. Masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan, padahal Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.
- e. Angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan belum terlaksana secara sepenuhnya amanat Pasal 31 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD/DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya dan sebagainya.

Ayo Berlatih !

Setelah membaca uraian singkat materi di atas, serta dengan menggali dari berbagai sumber diskusikanlah dengan teman sebangkumu pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Mengapa faktor ekonomi dianggap sebagai penyebab utama meningkatnya angka putus sekolah?
2. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa? Berikan alasannya!
3. Adakah faktor lain selain faktor ekonomi yang menjadi penyebab meningkatnya angka putus sekolah? Apabila ada, apa saja faktor tersebut?
4. Pada saat ini, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi permasalahan ini, di antaranya dengan memberikan Bantuan Operasional Sekolah, beasiswa, sekolah gratis, dan sebagainya. Menurut Anda, apakah upaya pemerintah tersebut sudah berhasil? Kemukakan indikator keberhasilannya.



PPKn - 1.3 2.3 3.3 4.3 /5/1-6

1. Petunjuk Umum UKBM

- a. Baca dan fahami materi pada *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan XII*. Edisi revisi 2018 Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal 22-23. Manfaatkan Perpustakaan, Lingkungan sekitar, jika memungkinkan browsing di internet atau pelajari materi di bawah ini!
- b. Setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah untuk berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini. Baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangkau atau teman lainnya!
- c. Kerjakan UKBM ini dibuku kerja!

3. Kasus Peningkaran Kewajiban Warga Negara

Pada kenyataannya, saat ini, banyak terjadi peningkaran terhadap kewajiban-kewajiban warga negara. Dengan kata lain, warga negara banyak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Peningkaran tersebut biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya peningkaran kewajiban oleh warga negara.

Peningkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat, di antaranya adalah sebagai berikut.

- a. Membuang sampah sembarangan
- b. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai Surat Izin Mengemudi, tidak mematuhi rambu rambu

- lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan sebagainya.
- c. Merusak fasilitas negara, misalnya mencorat-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon.
 - d. Tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir dan sebagainya.
 - e. Tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan siskamling.

Ayo Berlatih !

Bacalah kasus di bawah ini bersama teman sebangkumu.

Kesadaran Bayar Pajak Warga Masih Rendah

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan bahwa kesadaran warga Indonesia untuk membayar pajak hingga saat ini masih rendah. Hal itu terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan, yang membayar pajak. "Seharusnya ada enam juta perusahaan yang bayar pajak. Sekarang baru 520 ribu yang bayar. Sementara wajib pajak pribadi baru 30 persen yang bayar pajak," kata Fuad saat membuka acara seminar yang diadakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin, 23 September 2013.

Padahal, menurut Fuad, pajak merupakan instrumen yang penting dalam kehidupan bernegara. Seluruh kebutuhan pembangunan negara, baik pembangunan infrastruktur, belanja subsidi, dan kebutuhan belanja pegawai, dibayar dengan uang pajak. "Tapi sebagian besar masyarakat masih belum paham mengenai keberadaan pajak," katanya.

Fuad berharap seluruh elemen masyarakat mau berpartisipasi secara aktif untuk membangun negara dengan membayar pajak. "Bangsa yang besar dan maju itu sukses dalam perpajakan. Mereka (warganya) mau urunan," kata Fuad.

*Jika kesadaran warga dalam membayar pajak sudah terbangun, Fuad optimistis tax ratio akan terus tumbuh dan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan maksimal. "Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa maju dengan pesat. **Tax ratio** Cina mencapai 17,5 persen. Sedangkan Indonesia baru 12 persen. Kalau semua bayar pajak, tax ratio Indonesia bisa mencapai 18 persen," katanya.*

Sumber: <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/23/092515799>

Setelah membaca kasus di atas diskusikanlah dengan teman sebangkumu jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Apa saja yang menyebabkan rendahnya kesadaran membayar pajak?
2. Jelaskan akibat yang akan diterima negara ketika pendapatan dari pajak terus mengalami penurunan.
3. Apabila dikaitkan dengan Pancasila, kasus tersebut merupakan ketidaksesuaian dari sila keberapa? Berikan alasannya.

4. Apa saja solusi yang sudah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak? Bagaimana tingkat keberhasilan dari solusi tersebut?
5. Kemukakan solusi yang Anda tawarkan untuk meningkatkan kesadaran warga negara dalam membayar pajak dan kesadaran melaksanakan kewajiban lainnya sebagai warga negara.
6. Kemukakan kasus lain yang berkaitan dengan pengingkaran kewajiban warga negara yang pernah terjadi di daerahmu, serta bagaimana proses penyelesaiannya.

Kegiatan Belajar

PPKn - 1.4 2.4 3.4 4.4 /5/1-7

1. Petunjuk Umum UKBM

- a. Baca dan fahami materi pada *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan XII*. Edisi revisi 2018 Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal 24-26. Manfaatkan Perpustakaan, Lingkungan sekitar, jika memungkinkan browsing di internet atau pelajari materi di bawah ini!
- b. Setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah untuk berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini. Baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangkai atau teman lainnya!
- c. Kerjakan UKBM ini dibuku kerja!

Info Kewarganegaraan

Dalam hubungannya dengan penegakan hak dan kewajiban warga negara, Pancasila mengajarkan:

1. Sesungguhnya Tuhan YME adalah pencipta alam semesta.
2. Manusia adalah makhluk Tuhan YME yang mendapat anugerah-Nya berupa kehidupan, kebebasan dan harta milik.
3. Sebagai makhluk yang mempunyai martabat luhur, manusia mengemban kewajiban hidupnya, yaitu:
 - a. berterima kasih, berbakti dan bertakwa kepada-Nya;
 - b. mencintai sesama manusia;
 - c. memelihara dan menghargai hak hidup, hak kemerdekaan dan hak memiliki sesuatu; serta
 - d. menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku.

D. Penanggulangan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

1. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisasi atau bahkan dihilangkan.

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

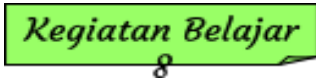
- a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
- b. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
- d. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
- e. Meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).
- f. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
- g. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing.

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum.

Ayo Berlatih !

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Akan tetapi, sampai sekarang kasus-kasus tersebut masih terjadi, seperti masih tingginya angka putus sekolah dan pengangguran, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Nah sekaitan dengan hal tersebut, jawablah pertanyaan berikut:

- 1) Mengapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara masih terjadi?
- 2) Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?
- 3) Apa saja solusi yang Anda ajukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?



PPKn - 1.4 2.4 3.4 4.4 /5/1-8

1. Petunjuk Umum UKBM

- Baca dan fahami materi pada *Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan XII*. Edisi revisi 2018 Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal 17-24. Manfaatkan Perpustakaan, Lingkungan sekitar, jika memungkinkan browsing di internet atau pelajari materi di bawah ini!
- Setelah memahami isi materi dalam bacaan, berlatihlah untuk berfikir tinggi melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKBM ini. Baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangkai atau teman lainnya!
- Kerjakan UKBM ini dibuku kerja!

2. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat Anda tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

Ayo Berlatih !

Lakukanlah identifikasi contoh perilaku yang dapat Anda tampilkan, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara.

Lingkungan keluarga	Lingkungan sekolah	Lingkungan masyarakat	Lingkungan bangsa dan negara

3. Penutup

Bagaimana kalian sekarang ? Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1 , 2, 4, 5, 6, 7 dan 8 berikut diberikan tabel untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada UKBM ini di tabel berikut.

Tabel Refleksi Diri Penguasaan Materi

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Apakah anda dapat menyebutkan nilai nilai yang terkandung dalam Pancasila		
2	Apakah anda dapat menjelaskan pengertian hak warga negara		
3	Apakan anda dapat menyebutkan macam-macam hak sebagai WNI		
4	Apakan anda dapat menyebutkan contoh perilaku yang tidak sesuai dengan pelaksanaan hak WNI		

Jika anda menjawab "tidak" pada salah satu pertanyaan diatas, maka pelajailah kembali materi tersebut dalam buku teks pelajaran (BTP) dan Pelajari ulang kegiatan belajar 1, 2, atau 3 yang sekiranya perlu kalian ulang dengan bimbingan guru atau teman sejawat. ***Jangan putus asa untuk mengulang lagi!*** Dan apabila kalian menjawab "Ya" pada semua pertanyaan maka lanjutkan dengan Test Formatif.

Dimana Posisimu ? Ukurlah diri kalian dalam menguasai materi "*Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dalam Perspektif Pancasila*". Setelah Anda menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, tentunya Anda semakin yakin bahwa hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya harus seimbang. Nah, coba sekarang renungkanlah hal-hal berikut serta cobalah berikan jawabannya. Setelah mampu Anda jawab, kemudian amalkanlah dalam kehidupanmu sehari-hari.

- 1) Bila Anda berbuat sewenang-wenang, siapakah yang dirugikan? Jika demikian, bagaimana keharusannya?
- 2) Pelanggaran hak cipta dalam bentuk penjualan VCD/DVD bajakan sangat merugikan pemegang hak ciptanya. Atas kejadian tersebut, bagaimana sikap Anda ketika menemukan barang-barang bajakan diperjualbelikan?
- 3) Coba kemukakan hak dan kewajiban yang ada di pundakmu sehubungan dengan kedudukanmu sebagai seorang anak, pelajar, kakak atau adik, warga kota atau desa dimana Anda bertempat tinggal?
- 4) Apa yang akan Anda lakukan apabila melanggar hak orang lain dan mengabaikan kewajiban?

Setelah kalian menuliskan penguasaanmu terhadap materi "*Kasus-Kasus Pelanggaran HAM dalam Perspektif Pancasila*", lanjutkan kegiatan anda untuk mengevaluasi penguasaan kalian,

Yuk Cek Kemampuanmu !

1. Pastikan komputer terhubung ke Local Area Network (LAN) yang ada di sekolah
2. Buka browser (Mozilla, Chrome, dll)
3. Tuliskan alamat : 192.168.0.101
4. Masukkan username dan password
5. Pilih dan klik Tugas / Ujian
6. Kerjakan dengan seksama (Anda hanya berhak mengerjakan sekali)
7. Apabila sudah selesai, silahkan cek nilai yang Anda peroleh
8. Apabila sudah melebihi KKM, silahkan lanjutkan ke UKBM selanjutnya.

